

**PELATIHAN AKUNTANSI PONDOK PESANTREN
BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) BAGI
PENGELOLA KEUANGAN PONDOK PESANTREN DI
KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA
NTB**

Saipul A Muhsyaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
saipulam@unram.ac.id

Siti Atikah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
siti.atikah@unram.ac.id

Iman Waskito

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
waskito.iman@unram.ac.id

Article History:

Received: 24 Oktober 2022

Revised: 9 November 2022

Accepted: 9 November 2022

DOI:

10.29303/abdimassangkabira.v3i1.325

Abstract: *The Islamic boarding school foundation is a non-profit entity that is obliged to compile financial reports as a form of accountability to the stakeholders and most importantly Allah SWT. There are several steps that must be taken by the Islamic boarding school foundation in preparing financial reports. First, the highest leadership of the foundation must make a strong commitment, starting to separate personal wealth from institutional wealth. The next step, the leadership must determine and place the right individual in the right place as an employee in charge of finance. The boarding school can be accompanied by this activity team or by academics in terms of carrying out an inventory of assets and liabilities, followed by measurement and preparation of the initial financial position report.*

Keywords: *accounting; standard; boarding school; financial; acuntability*

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren (ponpes) adalah lembaga pendidikan tradisional di Indonesia dimana nilai-nilai Islam digunakan sebagai dasar untuk proses belajar-mengajar. Pesantren memiliki sistem yang unik seperti yang digunakan pada umumnya sistem asrama, di mana para siswa tinggal di asrama ponpes siang dan malam untuk mempelajari nilai-nilai Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari (Arfandi, 2018).

Pesantren, dikemukakan Zamachsari Dhofier (Arfandi, 2018; Hadori, 2018) didefinisikan sebagai "sebuah sekolah asrama agama di mana para siswa tinggal dan belajar di bawah arahan seorang guru yang dikenal sebagai seorang Kyai." Pengertian ini menjelaskan peran kyai yang bertindak sebagai pemimpin informal, terutama untuk komunitas Muslim, dan memainkan perannya sebagai Pengkhotbah, Pendidik, dan sebagai tokoh agama dan masyarakat. Sementara guru di Pesantren disebut Kyai, siswanya disebut Santri ('Siswa'). Kata 'santri' berasal dari kata Sansekerta "Shastri", yang berarti siswa atau pelajar. Istilah Pesantren dibangun dengan menambahkan kata Santri dengan awalan 'pe' dan akhiran 'an', yang menghasilkan istilah 'Pesantrian' atau 'Pesantren'. Meskipun asal historis kata Pesantren tidak jelas, ia sudah ada sejak kurun kerajaan Islam di Aceh, abad pertama hijriah (Mighfar, 2018)

Pesantren dikenal menyediakan layanan pendidikan berbiaya rendah dan menjadi opsi utama bagi masyarakat Indonesia yang berasal dari keluarga miskin (Basri & Siti-Nabiha, 2016; Basri & Tabrani, 2010). Meskipun demikian, pertumbuhan jumlah ponpes terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data kementerian agama RI, jumlah pesantren aktif adalah sebanyak 28.194 ponpes di awal tahun 2020 atau meningkat sebanyak 976 dari 27.218 pada tahun 2010 (RI, 2021). Namun karena karakteristik organisasi ponpes yang unik dan berbeda dari organisasi nirlaba lainnya, yaitu karena didorong oleh keyakinan agama, ponpes kurang memberikan perhatian kepada pengelolaan keuangan yang memadai (Arifin, 2017; Eriyanto, 2018) Tidak mengherankan jika sebagian besar ponpes sangat bergantung kepada bantuan keuangan (sumbangan atau donasi) dalam menjalankan roda organisasinya. Sebagian besar ponpes tidak memiliki mekanisme kontrol untuk melindungi sumber daya ponpes dan secara kontinu memberi informasi kepada stakeholders mereka terkait status keuangan organisasi dan upaya penggalangan dana. Kondisi ini dikhawatirkan dapat melemahkan kemampuan ponpes dalam mencapai tujuan dan misi mereka (Arifin, 2017; Basri & Tabrani, 2010; Eriyanto, 2018).

Menyadari peran penting dan potensi strategis sumberdaya ponpes dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi negara, khususnya karena keberadaan ponpes telah banyak melahirkan para ilmuwan, pejuang, pemimpin, birokrat dan lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan

Indonesia. Kementerian Agama, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Bank Indonesia (BI), mengembangkan Pedoman Akuntansi Pesantren sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan akuntabilitas ponpes (IAI, 2018). Kegiatan pengabdian ini menggunakan Pedoman Akuntansi Pesantren ini sebagai bahan utama pelatihan bagi para pengurus/pengelola keuangan ponpes di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

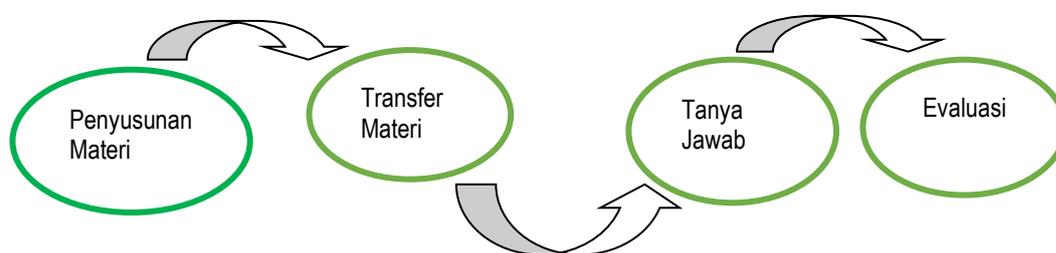
Saat ini Kabupaten Lombok Utara merupakan satu-satunya pemerintah kabupaten/kota yang masih berstatus Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Status daerah tertinggal ini diperparah oleh bencana gempa dahsyat pada tahun 2018 yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayahnya, termasuk aset-aset semua ponpes se-KLU yang berjumlah 28 ponpes. Selama masa pemulihan akibat bencana, ponpes menjadi salah satu aktor penting dari kelompok institusi keagamaan dengan mengambil peran sebagai tujuan penyebaran bantuan bagi masyarakat korban gempa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Forum Komunikasi Ponpes (FKSPP) di Kabupaten Lombok Utara, diperoleh informasi bahwa pada dasarnya ponpes menjalankan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik, akan tetapi pelaporan keuangan tersebut masih secara sederhana dan masih bersifat konvensional, yaitu hanya mengandalkan buku kas sebagai buku utama. Ponpes belum mengenal akuntansi dan beberapa teknik lainnya daftar in, apalagi dalam pengelolaan keuangan belum mengacu pada Praktek Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Pengurus FKSPP tersebut juga menuturkan bahwa pasca gempa, ponpes menerima banyak bantuan dari berbagai kalangan dalam jumlah yang sangat signifikan. Dikhawatirkan bantuan-bantuan tersebut tidak terkelola secara akuntabel sebagai akibat dari keterbatasan SDM akuntansi dan manajemen keuangan yang handal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Mitra kegiatan ini adalah ponpes yang berlokasi di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Ponpes ini, secara umum telah melakukan pencatatan keuangan, yakni penerimaan dan pengeluaran kas, namun tidak semua pesantren menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan bagi pendiri atau pengurus pesantren bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kebijakan keuangan pesantren, kinerja pesantren jika ditelaah dari total aset yang dikuasai, aset tetap yang masih berfungsi dengan baik maupun aset tetap yang rusak, serta berbagai manfaat lainnya (Susetyo et al., 2020). Untuk mendukung kegiatan pesantren dalam meningkatkan akuntabilitas keuangannya, tim memberikan pelatihan singkat mengenai konsep dasar akuntansi berdasarkan pedoman akuntansi pondok pesantren. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi mitra pesantren dalam menyusun laporan keuangannya di masa mendatang.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pembelajaran bagi orang dewasa. Pelatihan tidak hanya ditujukan bagi bendahara pesantren, namun diperkenankan juga dihadiri oleh bendahara sekolah, guru pesantren atau pegawai pesantren. Hal ini mempertimbangkan bahwa peserta tersebut dapat diperbantukan dalam mempercepat proses penyusunan laporan keuangan pesantren. Adapun teknis kegiatan yang dilakukan meliputi:



Gambar 1. Tahapan kegiatan

Penjelasan atas setiap tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan modul pelatihan; Tim memulai kegiatan dengan mempersiapkan bahan materi meliputi pedoman akuntansi pesantren beserta contoh-contoh transaksi. Tahap ini dilakukan bersama seluruh anggota tim agar terdapat kesepakatan dan persamaan persepsi mengenai pilihan-pilihan contoh transaksi yang akan diajukan sebagai contoh.
- 2) Transfer pengetahuan tentang akuntansi ponpes sesuai Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan IAI dan BI. Kegiatan pada tahapan ini, tim membagikan pengetahuan dalam bentuk presentasi. Materi yang disampaikan adalah penjelasan atas isi atau bab dalam pedoman akuntansi pesantren, seperti pengetahuan mengenai aset, kewajiban, ekuitas serta laporan keuangan. P
- 3) Tanya jawab mengenai praktek akuntansi di setiap pesantren. Tahapan tanya jawab ini dilaksanakan setelah peserta mengikuti proses transfer pengetahuan mengenai akuntansi ponpes. Peserta dapat memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang tidak mereka fahami mengenai istilah atau konsep dasar akuntansi. Namun, tim tidak menutupi kemungkinan, tim memberikan pertanyaan kepada peserta yang hadir. Pertanyaan dari tim kepada peserta meliputi: struktur organisasi, transaksi yang sering terjadi, penanggungjawab keuangan, penanggungjawab kegiatan sekolah, dan sebagainya. Pertanyaan yang diajukan oleh tim lebih mengarah kepada informasi khusus di setiap pesantren.

- 4) Evaluasi terhadap kemampuan peserta melalui post-test dan pre-test. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan tim dalam transfer pengetahuan kepada peserta. Pre-test maupun post test diberikan dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 10 pertanyaan. Selain soal pilihan ganda, tim juga menyaring saran dan masukan untuk peningkatan kegiatan di periode berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan bertempat di Pondok Pesantren Munabiul Hikmah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan bertemakan penyusunan laporan keuangan ponpes ini, menarik perhatian para guru dan pengelola keuangan ponpes. Ketertarikan ini membawa semangat baru bagi peserta kegiatan untuk mendengarkan dan berdiskusi dengan baik dan teratur sebagaimana tampak pada gambar 2.



Gambar 2. Peserta pelatihan sedang konsentrasi mendengarkan materi

Kegiatan ini sebagai titik awal mengajak pesantren menyusun laporan keuangan. Apakah pondok pesantren, tepatnya yayasan pondok pesantren, tidak menyusun laporan keuangan? Jawabannya terdiri dari dua: bisa "ya" atau "tidak". Hal ini ditengarai bahwa para penanggungjawab keuangan ponpes telah memahami surat Al-baqarah ayat 282, tentang catat-mencatat hutang dan piutang. Dengan demikian, pengurus yayasan ponpes, telah memerintahkan pengelola sekolah, membuat pembukuan kas sekolah.

Karakteristik pesantren mempengaruhi jenis dan kode akun dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini menjadi bagian yang perlu disosialisasikan kepada peserta pelatihan. Karakteristik pesantren seperti; pesantren modern ataukah pesantren sorogan, keberadaan unit usaha produktif, struktur organisasi sekolah (SMA, SMP, SD, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah), dan sebagainya. Inilah yang diuraikan dalam pelatihan. Karakteristik ini dijelaskan dalam bab pertama Pedoman Akuntansi

Pesantren (PAP) (IAI, 2018). Berdasarkan karakteristik pesantren ini, dapat menentukan laporan keuangan yang disusun oleh bendahara pesantren sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari setiap tingkatan sekolah dan setiap unit usaha, dengan asumsi setiap tingkatan sekolah atau setiap unit memiliki kasir atau bendahara sendiri (Susetyo et al., 2020).

Pondok pesantren di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara telah memiliki pembukuan. Pembukuan tersebut mencatat penerimaan kas dan pengeluaran kas, tidak disertai dengan pengelompokan atas jenis penerimaan atau pengeluaran. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 3

Tanggal Transaksi	Kode Akun	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
01-Sep-20		Saldo bulan sebelumnya (saldo awal)			150.000,00
19-Sep-20		penerimaan spp an siswa A	500.000,00		650.000,00
19-Sep-20		Belanja alat tulis kantor		500.000,00	150.000,00
20-Sep-20		penerimaan spp an siswa C	500.000,00		650.000,00
20-Sep-20		penerimaan spp an siswa B	500.000,00		1.150.000,00

Gambar 3. Ilustrasi Pembukuan kas pada beberapa pesantren, data diolah

Salah satu pesantren, telah memiliki pencatatan kas masuk dan keluar yang memadai. Kesimpulan ini diperoleh ketika tim meminta bendahara sekolah memberikan contoh buku kas yang mereka miliki. Buku kas tersebut terdiri dari beberapa kolom, yaitu: uraian, tanggal, jenis pengeluaran untuk setiap kolom berikutnya, kolom terakhir adalah total biaya yang dikeluarkan atau diterima. Kolom jenis pengeluaran terdiri dari biaya utilitas, biaya kesehatan dan kebersihan, biaya alat tulis kantor, biaya dapur dan sebagainya, sesuai dengan karakteristik setiap pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren ini telah membuat pengelompokan akun penerimaan dan akun pengeluaran. Sebagaimana ilustrasi pembukuan pada gambar 4.

Tanggal Transaksi	Kode Akun	Uraian	Penerimaan (Rp)					Pengeluaran (Rp)							Saldo (Rp)	
			SPP	Plutang dagang	Infak/tebakh	Lainnya	Jumlah penerimaan	Pembelian barang dagang	Transportasi	Administrasi & umum	Gaji, upah dan honor	Listrik, air, telepon	Lain-lain	Jumlah pengeluaran		
01-Sep-20		Saldo bulan sebelumnya (saldo awal)														150.000,00
19-Sep-20		penerimaan spp an siswa A	500.000,00				500.000,00									650.000,00
19-Sep-20		Belanja alat tulis kantor								500.000,00					500.000,00	150.000,00
20-Sep-20		penerimaan spp an siswa C	500.000,00				500.000,00									650.000,00
20-Sep-20		penerimaan spp an siswa B	500.000,00				500.000,00									1.150.000,00
																1.150.000,00

Gambar 4. Ilustrasi Pembukuan dengan Pengelompokan Akun

Salah satu pertanyaan yang dilemparkan oleh tim kegiatan ini kepada peserta yang hadir adalah keberadaan unit usaha. Untuk memenuhi kebutuhan santri, dalam lingkungan pesantren selalu ada usaha kecil atau warung yang menjual berbagai kebutuhan, seperti pakaian, sabun, pasta gigi, buku, makanan ringan, alas kaki, dan sebagainya. Berdasarkan pengamatan tim pengabdian, warung yang ada dilingkungan pesantren, dikelola dalam dua bentuk. Pertama, dikelola oleh individu-individu seperti:

guru atau karyawan yang telah berkeluarga dan tinggal dalam lingkungan pesantren. Kedua, dikelola oleh pesantren sendiri, dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru, karyawan dan santri. Pola pengelolaan keuangan dan administrasi pesantren yang sederhana dan bersifat kekeluargaan (Susetyo et al., 2020c; Yakin, 2017), serta fokus pada pengelolaan unit pendidikan (Arifin, 2017), sehingga banyak pesantren yang belum memasukkan unsur unit usaha dalam pencatatan keuangan pesantren secara utuh. Artinya, unit usaha toko atau warung atau yang sejenisnya, belum ditambahkan sebagai satu kesatuan entitas laporan yayasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil diskusi pada sesi pelatihan, pengurus dan pengelola pondok pesantren di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara akan tetap terus semangat mengimplementasikan pencatatan atas transaksi keuangan dan non keuangan yang terjadi di ponpes. Setelah mencatat transaksi, dilanjutkan dengan membukukan dan menyusun laporan keuangan pesantren. Awal langkah menyusun laporan keuangan bagi pesantren adalah mengidentifikasi aset yang dimiliki. Untuk melaksanakan hal ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Akademisi dapat mendampingi ponpes mulai dari tahap identifikasi hingga penyusunan laporan keuangan. Pihak ponpes mempersiapkan diri untuk membuat komitmen, ikhlas dalam bekerjasama mengidentifikasi aset awal dan menyusun laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi yang berlaku. Bersama-sama mewujudkan laporan keuangan pesantren yang akuntabel dan transparan.

Konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan ponpes mengawali pemberian materi. Waktu yang terbatas, hanya dua jam, menjadi kendala untuk memberikan materi yang lebih mendalam dan komprehensif. Selain dari sisi waktu, kendala terjadi dari sisi praktik. Tidak semua peserta bertugas sebagai bendahara sekolah maupun bendahara yayasan, sehingga pada pelatihan berikutnya perlu dipertimbangkan ketepatan peserta dan materi. Namun, semangat peserta kegiatan, memberikan angin segar untuk melanjutkan pelatihan ini menjadi proses pendampingan, baik oleh tenaga dosen maupun mahasiswa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada pimpinan pondok pesantren, pengurus harian, bendahara dan para guru maupun karyawan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini. Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan jajaran pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, yang telah membantu dalam hal

pendanaan dan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan peserta kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandi. (2018). Kepemimpinan Kiai Dalam Perilaku Budaya Organisasi Pondok Pesantren. In *Paradigma Baru Pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif* (pp. 141–167). IRCiSoD.
- Arifin, M. (2017). Manajemen Keuangan Pondok Pesantren. *Fikrotuna*, 4(2). <https://doi.org/10.32806/jf.v4i2.2745>
- Basri, H., & Siti-Nabiha, A. K. (2016). Accounting system and accountability practices in an Islamic setting: A grounded theory perspective. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 24(May), 59–78.
- Basri, H., & Tabrani, M. (2010). *Management and Financial Transparency of Islamic Religious Organizations: The Case Study of Modern Islamic Boarding School in Contemporary Indonesia*. 2(2), 1–10.
- Eriyanto. (2018). Pembaruan Manajemen Pendidikan Pesantren. In *Paradigma Baru Pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif* (pp. 263–281). IRCiSoD.
- Hadori, M. (2018). Tipologi Pondok Pesantren SalafiyahSyafi'iyah Situbondo dan Perannya dalam Memodifikasi Perilaku Santri. In *Paradigma Baru Pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif* (pp. 71–90). IRCiSoD.
- IAI, I. (2018). *Pedoman Akuntansi Pesantren*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Mighfar, S. (2018). Genealogi Pendidikan Pesantren Sebagai Pendidikan Multikultural dan Global Peace. In *Paradigma Baru Pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif* (pp. 169–193). IRCiSoD.
- RI, K. A. (2021). *Statistik Data Pondok Pesantren di Indonesia*. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>
- Susetyo, S. H. B., Atikah, S., & Fitriyah, N. (2020). Pelatihan Akuntansi Aset Tetap Di Pondok Pesantren 'NH'Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal PEPADU*, 1(1), 42–46.
- Yakin, N. (2017). Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren Al-Raisiyah di Kota Mataram. *Ulumuna*, 18(1), 199–220. <https://doi.org/10.20414/ujs.v18i1.159>